

## Analisis Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur

Stakeholder Analysis in the Implementation of Free Education Policy for Senior High Schools/Vocational High Schools in East Java Province

✉ **Vindha Tyas Restianingati**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Indonesia

### ARTICLE INFO

*Analisis Stakeholder, Implementasi Kebijakan, BPOPP, Pendidikan Gratis.*

*Article History:*

Received : 30 Mar, 2023

Accepted : 2 Des, 2024

Publish : 3 Des, 2024

### ABSTRAK:

Penelitian ini bermaksud menganalisis stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan document analysis dengan penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan program. Setelah dianalisis menggunakan "power/interest grid", ditemukan stakeholder yang termasuk dalam kategori "subject" yaitu Akademisi, Komite Sekolah Donatur/Swasta, Kepala Sekolah, Guru, dan Bendahara sekolah. Untuk "player" yaitu Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, DPRD Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Sedangkan "crowd" yaitu siswa dan orang tua siswa. Dan "context setter" yaitu media massa. Agar selanjutnya pelaksanaan program BPOPP dapat berjalan sesuai regulasinya, maka perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring. Selain itu, pembinaan terhadap bendahara sekolah dalam pengelolaan anggaran juga diperlukan agar anggaran tepat sasaran. Demi keberlanjutan program BPOPP diperlukan payung hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah sehingga kepala daerah lebih memiliki komitmen yang sifatnya lebih mengikat untuk melanjutkan program.

### ABSTRACT:

This study aims to analyze stakeholders involved in the implementation of the Education Implementation Operational Support Cost (BPOPP) policy in East Java. The research method used is based on document analysis with descriptive presentation. The results of the study indicate that stakeholder involvement is very influential in supporting the implementation of the program. After being analyzed using the "power/interest grid", stakeholders were found to be included in the "subject" category, namely Academics, School Committees, Donors/Private Sectors, Principals, Teachers, and School Treasurers. For "players" namely the Governor of East Java, Deputy Governor of East Java, East Java DPRD, East Java Provincial Education Office, and East Java Provincial Education Office Branches. While the "crowd" is students and parents of students. And the "context setter" is the mass media. So that the implementation of the BPOPP program can run according to its regulations, evaluation and monitoring need to be carried out. In addition, coaching for school treasurers in budget management is also needed so that the budget is right on target. For the sustainability of the BPOPP program, a higher legal umbrella is needed, namely Regional Regulations so that regional heads have a more binding commitment to continue the program.

### How to Cite:

Restianingati, V. T. (2024). Analisis Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(2), 291-306. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i2.537>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Gayung Kebonsari No.56, Gayungan,  
Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235

Email : v.t.restianingati@gmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a  
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 291-306

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pembangunan dari dalam dan dipengaruhi formulasi dari luar yang didasarkan pada anugerah alam (Dewey, 1986). Pendidikan adalah kekuatan pendorong dalam membangun keberlanjutan dan salah satu sarana komunikasi utama dan dasar bagi pola pikir keberlanjutan (Žalėnienė & Pereira, 2021). Pendidikan adalah salah satu investasi dalam memperoleh kehidupan yang lebih bermartabat serta turut serta dalam membangun bangsa dan negara. Salah satu arah kebijakan pendidikan di Indonesia adalah percepatan wajib belajar 13 tahun yaitu 1 tahun pendidikan pra sekolah dan 12 tahun di pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan tingkat menengah atau SMA memiliki peran krusial dalam membangun fondasi kemajuan suatu bangsa, terutama bagi negara-negara berkembang. Pendidikan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi, tetapi juga mengajarkan keterampilan hidup dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Pendidikan menengah memungkinkan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, pendidikan menengah menjadi modal yang penting untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang juga menjadi sasaran utama negara-negara berkembang seperti di kawasan Sub-Sahara Afrika dan Asia Tenggara.

Sebagai contoh di negara berkembang, pendidikan tinggi di Malaysia dianggap sebagai alat penting bagi pembangunan negara, oleh karena itu dukungan yang cukup besar diberikan melalui alokasi hibah pada pendidikan tinggi. Pemerintah Malaysia 90-95% biaya pendidikan tinggi negeri. Pinjaman pelajar juga diberikan dengan tingkat bunga bersubsidi bagi pelajar yang tidak mendapatkan beasiswa

baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta (Ahmad dkk., 2019). Selain itu juga perlu berkaca pada negara-negara di Eropa yang notabene negara maju, pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi warganya bahkan hingga tingkat perguruan tinggi. Subsidi atau biaya gratis dalam pendidikan dianjurkan dengan alasan memberikan pemerataan kesempatan, memastikan kesetaraan, kesempatan dalam pendidikan untuk semua orang terlepas dari tidak hanya latar belakang sosial, tetapi juga latar belakang ekonomi (Tilak, 2004). Dalam UU No. 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan dan tidak menghambat serta memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu.

Sebagai contoh, bahwa Finlandia adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan paling baik di dunia. Finlandia memberikan pendidikan gratis dari sejak pendidikan paud hingga pendidikan tinggi, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Sistem pendidikan Finlandia telah unggul sebagian besar negara dalam pengujian internasional termasuk komitmen yang luar biasa untuk melayani kebutuhan semua siswa, pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa, dan SDM pengajar yang sangat terlatih di negaranya, termasuk dalam penyediaan biaya pendidikan (Morgan, 2014). Sementara jika melihat sistem pendidikan Indonesia masih jauh dari langkah Finlandia, belum optimalnya pemerataan pendidikan hingga biaya pendidikan yang masih kurang untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Di Indonesia sendiri bantuan untuk pendidikan juga diberikan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau beasiswa bagi siswa kurang mampu. Subsidi dalam bidang pendidikan ini digunakan untuk mendukung operasional kegiatan

sekolah dan para siswa. Data nasional tahun 2023 Bappenas menyebutkan bahwa angka anak tidak sekolah usia 6-18 tahun di Indonesia sebesar 4.185.197 anak. Setiap tahun ajaran baru terdapat ratusan ribu anak yang baru kehilangan kesempatan bersekolah sebagaimana yang pernah dirasakan pada tahun ajaran sebelumnya. Salah satunya Jawa Timur menjadi daerah dengan angka anak tidak sekolah yang cukup tinggi. Dari data diskusi Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Perpres Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Jawa Timur menjadi daerah tertinggi dengan jumlah anak tidak sekolah setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu sebesar 270.532 anak, disusul dengan anak drop out sebesar 113.904 anak. Melihat data tersebut maka permasalahan ini menjadi sangat krusial untuk segera ditangani melalui peran dari stakeholder terkait.

Untuk menjamin keberlangsungan Program Pendidikan, Pemprov Jawa Timur sesuai kewenangannya memiliki kewenangan memberikan pendidikan gratis berkualitas (Tis Tas) atau disebut dengan Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi siswa SMA/SMA/Sekolah khusus baik negeri maupun swasta yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (Dinas Pendidikan, 2019). Dimulai pada tahun 2019, program ini adalah tidak lain merupakan implementasi program dari pasangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak yang dituangkan dalam rencana kerja Nawa Bhakti Satya salah satunya Jatim Cerdas dan Sehat.

Tujuan program BPOPP adalah mengembangkan kualitas pembelajaran dengan bantuan biaya operasional sekolah yang diperuntukkan bagi personalia maupun non-personalia. Dapat dikatakan bahwa BPOPP ini merupakan Subsidi atau Pengganti SPP untuk siswa/siswi SMA/SMK serta PK-PLK (Pendidikan Khusus-

Pendidikan Layanan Khusus (Sutanto dkk., 2022). Hal ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya anak yang putus sekolah karena faktor biaya pendidikan. Namun yang lebih penting, pelaksanaan program BPOPP masih jauh dari harapan. Program ini dinilai kurang efektif dan kurang proporsional. Salah satunya karena penerimaan anggaran BPOPP yang tidak tepat waktu. Idealnya anggaran BPOPP ini diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun seringkali mengalami keterlambatan dan berdampak pada operasional sekolah. Permasalahan ini muncul salah satunya karena adanya pandemi Covid-19 yang menuntut anggaran Pemprov untuk refocusing dan terpaksa pemberian anggaran mengalami keterlambatan. Akibat dari kondisi tersebut banyak sekolah yang kebingungan untuk mencari dana talangan untuk menutup biaya operasional sehingga mau tidak mau harus melibatkan komite sekolah dan orang tua untuk memikul beban biaya operasional bersama-sama (Sutanto dkk., 2022). Implementasi BPOPP dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang mendapatkan anggaran BPOPP. Pelaksanaan BPOPP sendiri tidak terlepas dari peran para aktor pembuat kebijakan hingga pada tataran implementasi program.

Untuk mengetahui aktor yang terlibat dan memiliki pengaruh pada program, penelitian ini akan melakukan analisis stakeholder pada program BPOPP. Konsep stakeholder memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan mengkategorikan pemangku kepentingan, dan memahami perilaku mereka (Aaltonen, 2011). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami pemangku kepentingan mengenai bagaimana organisasi disusun atau untuk memastikan signifikansinya bagi suatu proyek. Keterlibatan pemangku kepentingan juga dianggap penting sebagai bukti legitimasi demokratis

dalam menyelesaikan masalah sosial. Selanjutnya, analisisnya adalah penting karena organisasi dan individu dapat terlibat dalam memecahkan masalah publik (Kismartini dkk., 2023).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Chapleo & Simms, 2010) tentang analisis stakeholder pada perguruan tinggi. Penelitian menyoroti tiga faktor kunci yang mempengaruhi pengaruh pemangku kepentingan di Universitas, rekrutmen mahasiswa dan kepuasan, sifat pendanaan yang beragam dan implikasi keuangan, serta dampak potensial pada arah strategis organisasi, khususnya yang memiliki pengaruh langsung pada kebijakan dan strategi tersebut. Makalah ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada University of Portsmouth, Inggris.

Penelitian lain juga menjelaskan tentang analisis stakeholder dan berfokus pada dilema yang muncul terkait dengan barang hak cipta yang diproduksi dan digunakan di lingkungan universitas. Penelitian ini menggunakan analisis stakeholder untuk mengevaluasi undang-undang sehingga undang-undang dan kebijakan hak cipta lebih mencerminkan kepentingan peserta kunci dalam sektor pendidikan (Suthersanen, 2003). Sedangkan penelitian yang membahas tentang program BPOPP secara khusus pernah diteliti dengan hasil bahwa implementasi program BPOPP di SMA Negeri Jogoroto Jombang telah mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, namun dalam pengelolaan anggaran BPOPP masih diperlukan koordinasi dengan melibatkan baik guru dan karyawan di sekolah (Siswati & Anam, 2020).

Sangat penting untuk mengetahui siapa saja aktor yang memiliki pengaruh dan terlibat dalam implementasi BPOPP ini. Melalui analisis stakeholder ini akan diketahui kepentingan berbagai stakeholder

dan peran mereka dalam memberikan dampak positif atau negatif. Analisis stakeholder dikembangkan sebagai alat dengan tujuan yang sangat berbeda dalam kebijakan, manajemen, dan implementasi kebijakan (Brugha & Varvasovszky, 2000). Dalam kajian ini peneliti ingin menggambarkan peran stakeholders sehingga tujuan kebijakan Program BPOPP dengan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas untuk sekolah SMA dan SMK serta sekolah khusus dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena keterlibatan dan kolaborasi antar aktor implementasi program.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Analisis Stakeholder dalam sektor Pendidikan**

*Stakeholder theory* pertama kali dikembangkan dari studi bisnis. Pada 1990-an, metode analisis ini diterapkan kepada pengelolaan sumber daya alam. Analisis stakeholder adalah metode atau proses yang dilakukan melalui definisi pemangku kepentingan dan peran utamanya dalam satu sistem, mengevaluasi kepentingan dan preferensi ekonomi untuk memahami suatu sistem (Yang dkk., 2010). Tujuan dari metode ini untuk menemukan dan memverifikasi pemangku kepentingan dan mengevaluasi kepentingan mereka. Inti dari pemangku kepentingan analisis adalah untuk menentukan karakter dan tindakan para pemangku kepentingan, kemudian menentukan siapa kepentingan harus diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan.

Teori *stakeholders* menunjukkan bahwa adopsi analisis hubungan antara bisnis dan kelompok dan individu yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi olehnya (Parmar dkk., 2010). Sementara analisis *stakeholder* dianggap sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi kualitatif secara sistematis dalam mencari tahu kepentingan siapa

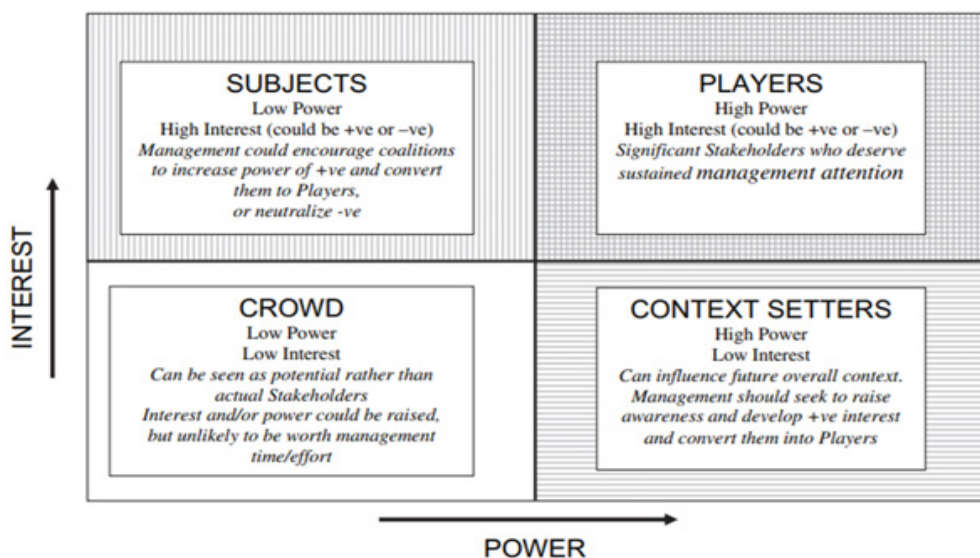


yang harus dipertimbangkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program (Schmeer, 2000). Analisis stakeholders mengacu pada berbagai instrumen untuk pengidentifikasian dan pendeskripsian stakeholder berdasarkan atribut, keterkaitan, dan kepentingan yang terkait dengan masalah atau sumber daya (Ramírez, 1999). Analisis stakeholder juga dipahami sebagai cara yang digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang diberikan kewenangan lebih yang kemudian menggunakan perencanaan untuk membangun dukungan (Thompson, 2020).

Lebih lanjut Thomson juga menjelaskan keuntungan dari penggunaan pendekatan berbasis stakeholder, antara lain :

- a. Dapat memanfaatkan argumen dari *stakeholder* yang paling kuat untuk membentuk kebijakan/program mulai awal;
- b. Memperoleh dukungan dari stakeholder yang kuat sehingga dapat membantu menggali sumber daya kemungkinan keberhasilan program lebih banyak;
- c. Komunikasi dengan para stakeholder sejak awal dapat memastikan bahwa para *stakeholder* dapat memahami program dan mendapat dukungan secara aktif;
- d. Dapat melakukan antisipasi reaksi orang terhadap program yang dijalankan, serta menyusun rencana yang akan mendapatkan dukungan masyarakat.

Diantara banyak peneliti manajemen *stakeholder*, Freeman telah mengidentifikasi dimensi power dan interest sebagai sesuatu yang signifikan, dan menyarankan penggunaannya melalui “*Power-Interest Grid*” untuk membantu mendefinisikan pemangku kepentingan yang lebih luas. Ackerman menjelaskan stakeholder dapat dianalisis menggunakan *grid power/interest*, Empat kuadran dari grid tersebut dapat mendefinisikan empat kategori pemangku kepentingan. Pertama, “*Player*” adalah pemangku kepentingan yang tertarik yang juga memiliki tingkat kekuatan yang tinggi untuk mendukung strategi perusahaan, memiliki power tinggi dan interest yang tinggi (*Low Power, High*



Sumber: Ackermann & Eden, 2011

**Gambar 1. Grid Power vs Interest**

*Interest*). Kedua, “Subject”, memiliki ketertarikan yang besar, namun memiliki pengaruh yang lebih kecil (*Low Power; High Interest*). Ketiga, “Context Setter” memiliki tingkat kekuasaan yang tinggi atas masa depan organisasi khususnya dalam hal mempengaruhi organisasi dalam konteks masa depan (*High Power; Low Interest*). Dan keempat, “Crowd” yang tidak menunjukkan minat atau kekuatan untuk mempengaruhi hasil strategi (*Low Power; Low Interest*) (Ackermann & Eden, 2011).

Pendidikan adalah bagian dari sektor publik. Orientasinya adalah memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara pada jenjang tertentu (Maric, 2013). Lembaga pendidikan milik pemerintah dirancang untuk memberikan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Di Indonesia, program wajib belajar 13 tahun mengharuskan pemerintah menyediakan akses pendidikan yang memadai termasuk pembiayaannya hingga pendidikan menengah. Untuk menunjang suksesnya program tersebut maka diperlukan peran dan komitmen dari aktor-aktor yang terlibat secara langsung pada implementasi program. Stakeholder analysis untuk pendidikan menengah merupakan proses untuk mengidentifikasi dan memahami pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, dan peran dalam pengembangan serta implementasi program pendidikan menengah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif dengan analisis dokumen. Analisis dokumen menggunakan berbagai sumber seperti laporan resmi pemerintah, peraturan pemerintah, berita media online, literatur ilmiah, dan buku (Rozikin dkk., 2018). Dokumen analisis adalah prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen baik cetak dan elektronik. Seperti metode analisis

lainnya dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen mengharuskan data diperiksa dan ditafsirkan untuk mendapatkan makna, mendapatkan pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris (Bowen, 2009). Peneliti menggunakan kata kunci BPOPP di Google Scholar. Namun pencarian terkait BPOPP masih terbatas, penelitian lain tentang biaya operasional sekolah lebih banyak membahas tentang BOS (bantuan operasional sekolah) yang merupakan program nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek. Sementara BPOPP ini adalah program khusus pemerintah provinsi Jawa Timur untuk SMA/SMK/sekolah khusus di Jawa Timur. Penelitian ini juga mengacu pada beberapa dokumen penting lainnya tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, untuk melengkapi data BPOPP peneliti juga mencari peraturan daerah terkait di Jawa Timur serta data lain yang terkait misalnya implementasi BOS, pendidikan menengah, dan pendidikan gratis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pendidikan Gratis di Jawa Timur

Kebijakan pendidikan gratis (Tis Tas) atau BPOPP dalam program Pemprov Jawa Timur yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan non-personalia bagi SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Timur. Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) mulai dilaksanakan pada tengah tahun anggaran 2019, sehingga sekolah SMA/SMK/Sekolah khusus baik negeri maupun swasta hanya mendapatkan anggaran selama 6 (enam) bulan saja dari dana BPOPP di 2 (dua) Triwulan yaitu periode Juli-September dan Oktober-Desember 2019 yang berasal dari Per-

ubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan penyaluran dana BPOPP dilaksanakan dalam Tahun Anggaran yang sama melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pada awal pelaksanaannya yaitu pada tahun 2019 dan 2020, dana BPOPP disalurkan setiap triwulan pada akhir bulan, namun berdasarkan hasil evaluasi penyaluran dana BPOPP kemudian dilakukan di awal triwulan atas pertimbangan sekolah akan menemui kesulitan untuk mengelola biaya operasionalnya jika diterimakan di akhir triwulan. Kondisi ini sering membuat sekolah mencari dana talangan dari pihak eksternal. Tentunya hal ini akan menghambat kegiatan operasional sekolah baik untuk kegiatan siswa maupun gaji guru-guru honorer/GTT. Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bersifat kegiatan, meliputi biaya penyiapan tempat kegiatan, honor narasumber dari luar sesuai standar biaya umum setempat, pengadaan alat tulis kantor atau penggandaan materi dan/atau perjalanan dinas dan/atau penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut jenis-jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini:

- a. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra-kurikuler.
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Penyelenggaraan/mengikuti kompetisi-kompetisi.
- d. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran.
- e. Penyediaan alat/bahan/media pembelajaran.
- f. Pengadaan, Pemeliharaan, perawatan, sarana prasarana dan lingkungan Sekolah

- g. Tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- h. Membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- i. Kegiatan literasi sekolah.
- j. Pembelian, penambahan/sewa alat multi media pembelajaran.
- k. Penguatan Pendidikan Karakter.
- l. Membiayai kegiatan yang belum didanai oleh BOS reguler.

Dalam implementasinya program BPOPP sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dibantu oleh Cabang Dinas Pendidikan yang ada di wilayah Kab/Kota. Dinas Pendidikan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi pengelolaan dana BPOPP terhadap sekolah-sekolah SMA/SMK termasuk dalam melakukan perencanaan anggaran dan penggunaannya untuk kegiatan operasional sekolah. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektifitas regulasi, efektifitas pelaksanaan (birokrasi), keterlibatan para pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Berbagai kegagalan program pemerintah sebagian besar disebabkan sistem dari tahap pelaksanaan yang kurang terencana dengan baik sehingga output yang dihasilkan kurang memuaskan. Dibalik implementasi program tentunya terdapat aktor yang berpengaruh terhadap program. Banyak sekali program pemerintah yang dilakukan tanpa perencanaan yang baik yaitu dimulai dengan penetapan tujuan, indikator, sasaran dan rancangan yang secara umum baik tapi kemudian mengalami berbagai masalah pelaksanaan.

### **Identifikasi Stakeholders**

*Stakeholders* merupakan pihak-pihak baik individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk pencapaian

tujuan suatu kegiatan (Wakka, 2014). Analisis stakeholder semakin populer di berbagai organisasi dan berbagai bidang, saat ini banyak digunakan oleh pembuat kebijakan, regulator, organisasi pemerintah dan non pemerintah, bisnis dan media (Reed dkk., 2009). Berdasarkan tahapan analisis, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masing-masing aktor. Para *stakeholder* ini merupakan aktor yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam menentukan keberhasilan sebuah program.

Dalam penelitian akan dilihat terlebih dahulu mana yang menjadi *stakeholder* kunci (*key stakeholder*) dan *stakeholder* pendukung (*potential stakeholder*). *Stakeholder* kunci adalah pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi program BPOPP termasuk pemerintah yang terlibat langsung dan mengambil hasil dari implementasi kebijakan pendidikan gratis. Sedangkan *stakeholder* pendukung merupakan individu atau organisasi yang tidak terlibat dalam program BPOPP namun mereka dapat mempengaruhinya. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan matriks tabel *stakeholder* (Lampiran 2).

Setelah dilakukan identifikasi terhadap *stakeholder* kunci dan *stakeholder* pendukung, selanjutnya untuk mengidentifikasi *stakeholder* dalam skala lebih luas maka digunakan *grid power/interest* untuk mengetahui lebih mendalam kekuasaan dan kepentingan para *stakeholder* dalam program BPOPP.

Dengan mengelompokkan pemangku kepentingan dalam matriks *power or interest*, kebijakan/program menghasilkan gambaran yang lebih baik terkait komunikasi dan keterkaitan antara *stakeholder* yang mempengaruhi program (Olander & Landin, 2005). Berdasarkan pembagian *grid power/interest* di atas maka dapat dilihat bahwa dalam kolom "*Subject*" terdapat beberapa *stakeholder* yang memiliki interest tinggi namun *power* rendah yaitu Akademisi, Komite Sekolah Donatur/Swasta, Kepala Sekolah, Guru, dan Bendahara sekolah. Mereka semua memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pelaksanaan program BPOPP, mampu menganalisa, mengkritik, dan mengelola program BPOPP namun dalam pengambilan keputusan sangat minim, mereka lebih banyak mengikuti peraturan yang berlaku.

Interest ↑	<i>Subject</i>	<i>Players</i>
	a. Akademisi b. Komite Sekolah c. Donatur/Swasta d. Kepala Sekolah e. Guru f. Bendahara sekolah	a. Gubernur Jatim b. Wagub Jatim c. DPRD Jatim d. Dinas Pendidikan Jatim e. Cabang Dinas Pendidikan
	<i>Crowd</i>	<i>Context Setter</i>
	a. Siswa b. Orang tua siswa	a. Media Massa
	Power →	

Sumber: Data Diolah

**Gambar 2. Grid Power/Interest Program BPOPP**



Untuk kolom “*Player*” yang merupakan pemeran utama kebijakan mereka di dalamnya termasuk Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, DPRD Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. *Stakeholder* kunci ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap program BPOPP karena mereka merupakan perumus, perencana, dan pemberi legitimasi atas Program BPOPP. Sementara untuk “*Crowd*” ditempati oleh siswa dan orang tua siswa dimana mereka tidak memiliki kepentingan dan kekuasaan terhadap program. Mereka hanya bertindak sebagai penerima program dan penerima dampak dari pemberian SPP gratis setiap bulannya. Sedangkan untuk “*Context Setter*” dalam penelitian ini adalah media massa dimana mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun dalam hal ini media massa kurang memiliki kepentingan yang besar.

#### **Peran *Stakeholder* dalam Kebijakan Pendidikan Gratis (TisTas) dalam Program BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan)**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis atau program BPOPP bagi siswa-siswi SMA dan SMK masih belum berjalan efektif dikarenakan distribusi anggaran yang kurang lancar sehingga mengakibatkan sekolah-sekolah mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya termasuk untuk membayar tenaga pendidik. Menghadapi permasalahan dan kendala dalam penyaluran anggaran, maka perlu keterlibatan para aktor atau *stakeholder* sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan Program BPOPP. Masing-masing *stakeholder* memiliki kemampuan dan ketrampilan serta perannya dalam mendukung jalannya program BPOPP.

Beberapa peran *stakeholder* yang seharusnya dapat dilakukan agar program BPOPP dapat berjalan sesuai rencana yang sudah disusun sebelumnya, sebagai berikut:

- a. Gubernur Jawa Timur, sesuai dengan program yang diusung dalam Nawa Bakti Satya bahwa Gubernur berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan di Jawa Timur melalui tagline Tis Tas (Gratis Berkualitas), program ini diwujudkan dalam BPOPP yaitu pemberian dana operasional sekolah atau SPP gratis bagi SMA/SMK. Selaku pengambil kebijakan Gubernur Jatim seharusnya melakukan pemantauan terhadap jalannya program sehingga jika ada kendala di lapangan dapat segera diatasi.
- b. Wakil Gubernur Jatim, kedudukan Wagub Jatim hampir sama dengan Gubernur Jatim yaitu selaku aktor dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan pencairan dana BPOPP seharusnya tidak terjadi jika program BPOPP ini diawasi dengan baik. Peran yang seharusnya diambil adalah membantu gubernur dalam melakukan pemantauan kebijakan di lapangan.
- c. DPRD Provinsi Jatim, DPRD membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam proses pengesahan Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait dengan penyediaan biaya penunjang operasional personalia dan nonpersonalia bagi SMA dan SMK serta sekolah khusus baik negeri dan swasta yang bersumber dari APBD. Peran DPRD seharusnya dapat membantu mengawasi jalannya program, memberikan masukan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.
- d. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, selaku pelaksana program BPOPP sekaligus pembina sekolah SMA/SMK di Jawa Timur, peran Dinas Pendidikan seharusnya mampu mengakomodir kebutuhan sekolah-sekolah. Mendesak

- para *policy maker* mengutamakan anggaran pendidikan untuk SPP gratis daripada dialihkan untuk program lainnya. Dinas Pendidikan juga berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi program.
- e. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, cabang dinas bertugas membantu Dinas Pendidikan untuk mengkoordinasi sekolah di wilayahnya masing-masing di setiap Kab/Kota. Cabang dinas juga diharapkan mampu membantu sekolah-sekolah untuk menemukan solusi. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan hasil evaluasi kepada *policy maker*.
  - f. Kepala Sekolah SMA, dalam Program BPOPP ini Kepala Sekolah adalah pihak yang menerima bantuan dana operasional sekolah. Kepala sekolah hanya berperan untuk mengarahkan pengelolaan dana BPOPP agar sesuai dan tepat sasaran.
  - g. Komite Sekolah, peran dari komite sekolah adalah mendukung tugas Kepala sekolah dalam menyelenggarakan dan mengelola sumber daya di sekolah. Dalam konteks BPOPP ini komite sekolah seharusnya membantu kepala sekolah dalam memecahkan kendala yang dihadapi misalnya dalam kekurangan anggaran, komite sekolah berkewenangan untuk mengadakan rapat dengan para orang tua siswa untuk bekerja sama dalam membantu biaya operasional sekolah.
  - h. Guru Sekolah, dalam hal ini jika GTT/honorer maka guru adalah sebagai penerima dana BPOPP. Karena sebagian dana BPOPP untuk kepentingan personalia yaitu membayar gaji guru honorer/GTT yang tidak tercover dalam dana BOS atau dana sekolah. Dalam konteks ini guru sebenarnya hanya melaksanakan keputusan dari Kepala Sekolah.
  - i. Bendahara Sekolah, merupakan aktor/stakholder yang menjalankan tugas pengelolaan dana BPOPP. Dalam hal ini bendahara sekolah berperan mengatur keluar masuknya dana dalam RKAS.
  - j. Siswa SMA/SMK, tidak memiliki peran yang berarti dalam program BPOPP, hanya sebagai penerima program
  - k. Orang Tua Siswa, tidak memiliki peran yang berarti dalam program BPOPP, merasakan dampak program karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk SPP anak, hanya iuran bersifat sukarela.
  - l. Donatur/Swasta, tidak memiliki kewenangan dalam program BPOPP, namun donatur berperan dalam mendukung biaya operasional sekolah agar tetap berjalan. Donatur dalam hal ini bisa orang tua siswa, yayasan, atau pihak swasta yang sukarela memberikan dukungan untuk kemajuan serta kegiatan operasional sekolah.
  - m. Akademisi, memang tidak memiliki kewenangan maupun kekuasaan untuk mempengaruhi program, namun akademisi melalui kemampuan analisisnya dapat membantu melakukan kajian dan telaah dalam melihat pelaksanaan program BPOPP.
  - n. Media Massa, memiliki power yang besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun kepentingan tidak terlalu besar. Sehingga peran media diharapkan dapat menjadi pengawas dan kritik terhadap permasalahan program BPOPP.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, program BPOPP di Jawa Timur dalam pelaksanaannya telah merujuk pada Regulasi dan Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan, namun ternyata dalam implementasinya program BPOPP masih menemui kendala. Hal ini tidak terlepas dari peran para aktor/*stakeholder* yang terlibat dalam program.

Pada kategori “*Subject*” aktor yang terlibat yaitu Akademisi, Komite Sekolah Donatur/Swasta, Kepala Sekolah, Guru, dan Bendahara sekolah. Mereka memiliki tingkat kepentingan terhadap program BPOPP namun kekuasaan rendah. Kategori “*Player*” adalah *stakeholder* yang berasal dari level pemerintahan yaitu Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, DPRD Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim selaku para perumus dan pembuat kebijakan. Mereka memiliki interest dan power yang tinggi terhadap program BPOPP. Kategori “*Crowd*” adalah siswa dan orang tua siswa selaku penerima program dan penerima dampak. Mereka tidak memiliki kepentingan dan kekuasaan dalam program BPOPP. Dan pada kategori “*Context Setter*” dalam program BPOPP ini adalah media massa, yang memiliki pengaruh besar menyampaikan berita ke masyarakat luas, namun kepentingan yang dimiliki rendah.

Dari kesimpulan yang dihasilkan maka untuk pelaksanaan program BPOPP ke depan diharapkan akan berjalan sesuai perencanaan, Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan komitmen antar stakeholder dalam melaksanakan Program BPOPP ke depan. Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menelaah pelaksanaan regulasi yang ada melalui dengar pendapat dari pihak sekolah terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga para pimpinan tinggi mengetahui dan memahami permasalahan di lapangan. Lebih lanjut, Dinas teknis pelaksana program perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun terhadap pelaksanaan program BPOPP dengan melihat secara detail kemampuan pengelola anggaran, penggunaan anggaran apakah tepat sasaran atau tidak. Kepala sekolah dan jajarannya,

baik guru dan bendahara sekolah juga perlu secara aktif menyampaikan hambatan yang terjadi di sekolah masing-masing, agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas terkait. Selain itu kolaborasi dengan pihak swasta/donatur untuk mendukung keberlanjutan operasional sekolah juga penting untuk dilakukan. Penelitian lebih lanjut terkait *stakeholder analysis* pada sektor pendidikan ini dapat dilakukan dengan lebih fokus pada evaluasi program yang sudah dijalankan. Peneliti selanjutnya dapat lebih detail menggambarkan aktor-aktor yang terlibat dan mendukung evaluasi program-program pendidikan serta partisipasi publik maupun swasta dalam upaya meningkatkan pendidikan gratis bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aaltonen, K. (2011). Project Stakeholder Analysis As an Environmental Interpretation Process. *International Journal of Project Management*, 29(2), 165-183. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.02.001>.
- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>.
- Ahmad, N., Ismail, R., & Abdul-Hakim, R. (2019). Higher Education Subsidy in Malaysia: The Benefit Incidence Analysis. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 4(25), 72-84.
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Review Article Stakeholder Analysis : A Review. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239-246.

- Chapleo, C., & Simms, C. (2010). Stakeholder Analysis in Higher Education a Case Study of the University of Portsmouth. *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, 14(1), 12-20. <https://doi.org/10.1080/13603100903458034>.
- Dewey, J. (1986). Experience and Education. *Educational Forum*, 50(3), 242-252. <https://doi.org/10.1080/00131728609335764>.
- Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur. (2019). *Petunjuk Teknis Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA, SMK, PK-PLK Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur*. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Glenn A. Bowen. (2009). Document Analysis As a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Kismartini, K., Roziqin, A., & Authori, N. (2023). A Stakeholder Analysis for Sustainable Development of Maritime Village in Semarang Coastal Community, Indonesia. *Public Administration and Policy*, 26(3), 321-334. <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2022-0119>.
- Maric, I. (2013). Stakeholder Analisis of Higher Education Institutions. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*, 11(2), 217-226. <https://doi.org/10.7906/indecs.11.2.4>.
- Morgan, H. (2014). Review of Research: The Education System in Finland: A Success Story Other Countries Can Emulate. *Childhood Education*, 90(6), 453-457. <https://doi.org/10.1080/00094056.2014.983013>.
- Olander, S., & Landin, A. (2005). Evaluation of Stakeholder Influence in the Implementation of Construction Projects. *International Journal of Project Management*, 23(4), 321-328. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.02.002>.
- Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder Theory: The State of the Art. *Academy of Management Annals*, 4(1), 403-445. <https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>.
- Ramírez, R. (1999). Stakeholder Analysis and Conflict Management. In *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management* (Issue 9).
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933-1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>.



- Rozikin, M., Hesty, W., Sulikah, S., Tasruddin, R., Mukhlis, M. B., Yulianti, R., Khalimatussa'diyah, N., Darwis, R. S., Resnawaty, R., & Hassanah, D. (2018). Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 16(1), 48–59.
- Schmeer, K. (2000). Stakeholder Analysis Guidelines - Section 2. *Stakeholder Analysis Guidelines*, 15, 338-345.
- Siswati, L., & Anam, C. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (Study Kasus Di Sma Negeri Jogoroto – Jombang). *National Conference Multidisciplinary*, 2020, 191-192.
- Sutanto, S. H., Restianingati, V. ., Judhaswati, R., Indarto, E. K., & Agustina, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *SEMINAR NASIONAL Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global*.
- Suthersanen, U. (2003). Copyright and educational policies: a stakeholder analysis. *Oxford Journal of Legal Studies*, 23(4), 585–609.
- Thompson, R. (2020). Stakeholder Analysis. *Training for Project Management*, 215-220. <https://doi.org/10.4324/9781315264783-79>.
- Tilak, J. B. G. (2004). Public Subsidies in Education in India. *Economic & Political Weekly*, 39(4), 343–359.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47-55. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55>.
- Yang, Z., Ju, M., Zhou, Y., Wang, Q., & Ma, N. (2010). An Analysis Of Greenhouse Gas Emission Trading System from the Perspective of Stakeholders. *Procedia Environmental Sciences*, 2(5), 82-91. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2010.10.012>.
- Žalėnienė, I., & Pereira, P. (2021). Higher Education For Sustainability: A Global Perspective. *Geography and Sustainability*, 2(2), 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.001>.

Lampiran 1. Besaran Satuan Biaya BPOPP Untuk SMK/SMK Berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Indeks	Biaya/Siswa/Tahun (Rp)			Jumlah SPP Per Siswa Bulan (Rp) Biaya/Siswa/Tahun BPOPP Rp. 1.400.000,-		
			SMA	SMK Non Teknik	SMK Teknik	SMA	SMK Non Teknik	SMK Teknik
1.	Kota Surabaya	1.00	3.000.000	3.500.000	4.000.000	135.000	175.000	215.000
2.	Kota Malang	0.95	2.850.000	3.325.000	3.800.000	120.000	160.000	200.000
3.	Kota Madiun	0.90	2.700.000	3.150.000	3.600.000	110.000	145.000	185.000
4.	Kab Malang	0.77	2.310.000	2.695.000	3.080.000	75.000	110.000	140.000
5.	Kab Madiun	0.75	2.250.000	2.626.000	3.000.000	70.000	110.000	135.000
6.	Kab Ngawi	0.75	2.190.000	2.555.000	2.929.000	65.000	100.000	130.000
7.	Kab Bojonegoro	0.85	2.550.000	2.975.000	3.400.000	95.000	135.000	170.000
8.	Kab Tuban	0.80	2.400.000	2.800.000	3.200.000	85.000	120.000	150.000
Dst....								

Sumber: Data Diolah

Lampiran 2. Matriks *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	<b>Peran dalam Program BPOPP</b>	<b>Kepentingan</b>	<b>Pengaruh pada Keberhasilan Program</b>
<b>Key Stakeholder</b>			
Gubernur Jatim	Pembuat Kebijakan	Melaksanakan visi dan misi program nawa bhakti satya gubernur, mengurangi beban biaya sekolah	Sangat berpengaruh
Wakil Gubernur Jatim	Pembuat Kebijakan	Melaksanakan visi dan misi program nawa bhakti satya gubernur, mengurangi beban biaya sekolah	Sangat berpengaruh
DPRD Jatim	Pembuat Kebijakan	Mendukung program Gubernur dan wakil gubernur Jatim yang bertujuan untuk membantu biaya operasional SMA/SMK	Sangat berpengaruh
Dinas Pendidikan Provinsi Jatim	Pelaksana Program BPOPP	Melaksanakan program BPOPP, membina SMA/SMK di Jatim, monitoring dan evaluasi	Berpengaruh
Cabang Dinas Pendidikan	Pelaksana Program BPOPP	Melaksanakan program BPOPP, membina SMA/SMK di Wilayah Cabang Dinas masing-masing, monitoring dan evaluasi	Berpengaruh
<b>Potential Stakeholder</b>			
Kepala Sekolah SMA/SMK	Pelaksana Program BPOPP	Menjalankan Program BPOPP di sekolah SMA/SMK	Sedikit berpengaruh
Komite Sekolah SMA/SMK	Pengamat Program BPOPP	Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BPOPP	Sedikit berpengaruh
Guru SMA/SMK	Penerima Program BPOPP	Sebagian guru honorer atau GTT dibayarkan dengan dana BPOPP, mereka yang merasakan dampak	Sedikit berpengaruh
Bendahara BPOPP sekolah	Pengelola Dana Program BPOPP	Mengelola dana BPOPP untuk operasional sekolah	Sedikit berpengaruh
Siswa SMA/SMK	Penerima Program BPOPP	Merasakan dampak dari program BPOPP	Tidak berpengaruh

<b><i>Stakeholder</i></b>	<b>Peran dalam Program BPOPP</b>	<b>Kepentingan</b>	<b>Pengaruh pada Keberhasilan Program</b>
Orang Tua Siswa	Pengamat Program BPOPP	Merasakan dampak dari program BPOPP	Tidak Berpengaruh
Donatur /Swasta	Pengamat Program BPOPP	Memberikan kontribusi dan dukungan dana bagi pihak sekolah	Berpengaruh
Akademisi	Pengamat Program BPOPP	Akademisi memiliki kemampuan dalam menganalisis pelaksanaan BPOPP	Berpengaruh
Media Massa	Pengamat Program BPOPP	Media massa dapat meyebarluaskan informasi dan berita tentang pelaksanaan Program BPOPP	Berpengaruh

Sumber: Data Diolah